

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan berbasis elektronik (e-Musrenbang) di Kelurahan Sungai Bambu Kota Administrasi Jakarta Utara secara keseluruhan dinilai mempunyai tingkat partisipasi yang cukup baik walaupun terdapat permasalahan dalam proses pelaksanaannya. Adapun hasil kesimpulan terperinci untuk setiap aspek penelitian adalah sebagai berikut:

1. **Aspek partisipasi masyarakat dalam proses sosialisasi e-Musrenbang:** dalam aspek ini masyarakat telah cukup berpartisipasi dengan menghadiri sosialisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah Kelurahan Sungai Bambu. Sosialisasi berlangsung dalam tahapan pra rembuk RW dan tahap pelaksanaan rembuk RW. Partisipasi ini belum maksimal karena tidak semua masyarakat menghadiri sosialisasi tersebut. Yang hadir adalah tokoh masyarakat, pengurus RW dan pengurus RT. Dari yang diundang inipun tidak semuanya bisa hadir karena bertepatan dengan adanya kegiatan mereka disaat yang bersamaan (mereka bekerja). Diharapkan mereka yang hadir ini dapat meneruskan lagi informasi yang diperoleh dalam sosialisasi tersebut kepada masyarakat lainnya yang berada di dalam wilayah mereka. Namun, informasi yang diperoleh pada saat sosialisasi banyak yang tidak diteruskan lagi kepada masyarakat yang lain. Untuk itu diperlukan suatu platform untuk membantu menyebarluaskan informasi yang didapat dalam sosialisasi e-Musrenbang ini. Informasi yang diperoleh dalam sosialisasi terkait dengan antara lain: perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan, alur proses e-Musrenbang, dan peran pihak-pihak yang terkait dalam e-Musrenbang.

2. **Aspek partisipasi masyarakat dalam monitoring usulan masyarakat yang belum terakomodir pada tahun sebelumnya:** masyarakat telah melakukan monitoring terhadap usulan mereka yang belum terakomodir pada tahun-tahun sebelumnya. Namun hal ini tidak maksimal terlaksana karena tidak semua usulan dari masyarakat dapat terakomodir, yang pada gilirannya memunculkan beragam permasalahan yang memerlukan solusi. Pihak Kelurahan dan RW memegang peran penting dalam memberikan bimbingan dan saran kepada masyarakat tentang bagaimana menghadapi usulan yang belum terakomodir pada tahun-tahun sebelumnya. Salah satu solusi yang ditawarkan oleh pemerintah kelurahan adalah dengan mengakses arsip tahunan yang dapat ditemukan pada website musrenbang.jakarta.go.id. Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat memanfaatkan momen reses yang diadakan oleh anggota DPRD yang dapilnya ada di wilayah mereka. Selama acara reses, warga diberi peluang untuk mengusulkan usulan mereka, terutama jika usulan pembangunan yang telah diajukan sebelumnya belum diakomodir. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk memastikan bahwa kepentingan dan aspirasi masyarakat tetap menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pengembangan wilayah ini.

3. **Aspek partisipasi masyarakat dalam penginputan usulan melalui sistem e-Musrenbang:** dalam aspek ini, masyarakat telah melakukan inputan usulan melalui sistem e-Musrenbang. Masyarakat yang dimaksud disini adalah mereka yang dipilih untuk mewakili masyarakat yang kemudian ditugaskan menjadi pendamping rembuk RW. Pendamping ini dipilih oleh pemerintah kelurahan melalui suatu proses seleksi. Salah satu tugas dari pendamping rembuk RW ini adalah melakukan penginputan usulan perencanaan pembangunan yang berasal dari masyarakat ke dalam sistem e-Musrenbang. Tantangan yang muncul dalam penginputan usulan melalui sistem e-Musrenbang mencakup kesalahan input titik lokasi proyek, yang dapat mengakibatkan ketidakakuratan dalam penentuan lokasi proyek. Selain itu,

kesalahan dalam input satuan ukuran pada wilayah yang akan dibangun juga merupakan masalah yang perlu diatasi. Di samping masalah teknis ini, ada faktor psikologis dan emosional yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses e-Musrenbang. Kehawatiran terkait dengan banyaknya usulan masyarakat yang belum mendapatkan akomodasi pada tahun-tahun sebelumnya telah menciptakan perasaan kejenuhan di kalangan masyarakat. Sehingga masyarakat kurang antusias dalam memberikan usulan yang kemudian akan diinput oleh pendamping rembuk RW. Untuk itu, pendamping rembuk RW perlu dibekali dengan keterampilan teknis lainnya untuk memotivasi masyarakat agar lebih aktif dalam memberikan usulan melalui e-Musrenbang.

B. Saran

Untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan e-Musrenbang di Kelurahan Sungai Bambu Kota Administrasi Jakarta Utara, maka penulis memberikan sarannya sebagai berikut:

1. **Untuk aspek partisipasi masyarakat dalam sosialisasi e-Musrenbang:** disarankan kepada Pemerintah Kelurahan Sungai Bambu untuk menambah satu tahapan rembuk yakni rembuk RT untuk memperluas cakupan masyarakat dalam penyebarluasan informasi terkait perencanaan pembangunan daerah khususnya pembangunan untuk wilayah Kelurahan Sungai Bambu. Selain itu, waktu untuk melaksanakan sosialisasi ini agar disesuaikan dengan waktu luang masyarakat agar tidak berbenturan dengan jadwal pekerjaan mereka. Untuk Pemerintahan Kelurahan Sungai Bambu juga perlu menambah kriteria orang yang diundang, misalnya ketua daswa wisma dan ketua karang taruna. Mengingat karena keterbatasan anggaran, maka tidak mungkin mengundang seluruh warga masyarakat sehingga dapat memanfaatkan Whatsapp Group masyarakat di RT maupun RW. Dalam sosialisasi ini perlu juga ditekankan bahwa mereka yang diundang ini

diharapkan dapat memberi kontribusi berupa penyebarluasan informasi kepada masyarakat yang tidak diundang yang berada di wilayah mereka.

- 2. Untuk aspek partisipasi masyarakat dalam monitoring usulan masyarakat yang belum terakomodir pada tahun sebelumnya:** disarankan kepada pemerintah kelurahan untuk memberikan informasi kepada warga bahwa informasi yang dibagikan pada saat acara sosialisasi juga dapat diperoleh dengan memanfaatkan media sosial. Dalam hal ini adalah website *musrenbang.jakarta.go.id*. website ini secara resmi dibangun oleh Bappeda Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, meningkatkan kerjasama yang intensif dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta agar pada saat reses mengutamakan agenda rembuk warga di dapilnya masing-masing untuk menjaring aspirasi masyarakat yang belum tertampung atau belum teralisir melalui mekanisme e-Musrenbang.
- 3. Untuk Aspek partisipasi masyarakat dalam penginputan usulan melalui sistem e-Musrenbang:** disarankan kepada Pemerintah Kelurahan Sungai Bambu untuk memberikan arahan kepada pendamping rembuk RW agar lebih teliti lagi dalam penginputan dalam sistem e-Musrenbang. sehingga tidak muncul lagi kesalahan yang menyangkut indikator volume, luas, dan titik lokasi data yang diinput. Selain itu Pemerintah Kelurahan Sungai Bambu bisa mengajukan surat kepada Bappeda Provinsi DKI Jakarta melalui Pemerintah Kecamatan Tanjung Priuk untuk memperkuat keterampilan teknis bagi pendamping rembuk RW misalnya pelatihan terkait psikologi, *moderation technique*, komunikasi verbal yang menarik. Sehingga masyarakat yang tadinya jenuh dan pesimis dalam memberikan usulan pembangunan dapat menjadi termotivasi untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan e-Musrenbang. Karena hasil akhir dari e-Musrenbang ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat juga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi, I. R. (2007). *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas*. Depok: Universitas Indonesia.
- Afrizal. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Depok: Rajawali Pers.
- Azzahra, A. A. (2016). *Pengaruh Penerapan e-Government Terhadap Tata Kelola Pemerintah di Pemerintah Kota Tasikmalaya*. Bandung: Universitas Widyatama.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Djalil, R. (2014). *Akuntabilitas Keuangan Daerah: Implementasi Pasca Reformasi*. Jakarta: RMBooks.
- Dwiningrum, S. I. (2015). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Edi, S. (2017). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Hermanus, E., dan Utami, H. (2022). *Implementasi Musyawarah Khusus untuk Perencanaan dan Penganggaran Desa yang Inklusif*. Jakarta: KOMPAK.
- Indrajit, R. E. (2005). *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: ANDI.
- Indrawan, R. d. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran Untuk Manajemen, Pembangunan dan Pendidikan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Korten, D. C. (1988). *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mahsun, M. (2018). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPF E.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.

Nofianti, L. (2015). *Public Sector Governance Pada Pemerintah Daerah*. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Ridwan. (2013). *Perencanaan Paripatitif*. Surabaya: CV. R.A.De.Rozarie.

Sedarmayanti. (2014). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Mandar Maju.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukmadinata, N. S. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosadakarya.

B. Dokumen

Gubernur DKI Jakarta. (2016). *Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi*. Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Gubernur Provinsi DKI Jakarta. (1996). *Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 752 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan Satuan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta*. Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Gubernur Provinsi DKI Jakarta. (2011). *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2011 Provinsi DKI Jakarta*. Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Gubernur Provinsi DKI Jakarta. (2011). *Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu*. Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Gubernur Provinsi DKI Jakarta. (2018). *Surat Edaran Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 73/SE/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2019 dan Pendampingan Rembuk Warga Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020*. Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Gubernur Provinsi DKI Jakarta. (2018). *Surat Edaran Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 73/SE/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2019*

dan Pendampingan Rembuk Warga Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020. Jakarta.

Gubernur Provinsi DKI Jakarta. (2020). *Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.* Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Gubernur Provinsi DKI Jakarta. (2020). *Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.* Jakarta.

Gubernur Provinsi DKI Jakarta. (2022). *Pedoman Umum Pelaksanaan Rembuk RW 2023.* Jakarta: Bappeda.

Kementerian Dalam Negeri. (2010). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyesunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.* Jakarta.

Kementerian Dalam Negeri. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).* Jakarta.

Pemerintah Kelurahan Sungai Bambu Kota Administrasi Jakarta Utara. (2023). *Laporan Bulanan Kelurahan Sungai Bambu Bulan Agustus 2023.* Jakarta: Kelurahan Sungai Bambu.

Politeknik STIA LAN Jakarta. (2022). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir.* Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Presiden Republik Indonesia. (2001). *Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendetayagunaan Telematika (Telekomunikasi, Media, dan Informatika) di Indonesia.* Jakarta.

Presiden Republik Indonesia. (2003). *Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.* Jakarta.

Presiden Republik Indonesia. (2004). *UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.* Jakarta.

Presiden Republik Indonesia. (2014). *Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Jakarta.

C. Skripsi & Tesis

HS, S. (2005). *Analisis Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif Pada Proses Perencanaan Pembangunan Di Kota Semarang (Studi Kasus Pelaksanaan Penjaringan Aspirasi Masyarakat Di Kecamatan Banyumanik*. Tesis Program Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro, 26.

Purnamasari, I. (2008). *Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi*. (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro)

Bawana, B. (2017). *Efektivitas Aplikasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Elektronik (E-MUSRENBANG) Di Kelurahan Kebon Kacang Kota Administrasi Jakarta Pusat*. Jakarta: STIA LAN Jakarta.

Karuniawati, R. D., & Fanida, E. H. (2016). *Efektifitas Sistem Elektronik Musyawarah Rencana Pembangunan (e-Musrenbang) Di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.

Soemarmo. (2005). *Analisis Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif Pada Proses Perencanaan Pembangunan Di Kota Semarang (Studi Kasus Pelaksanaan Penjaringan Aspirasi Masyarakat Di Kecamatan Banyumanik)*. Semarang: Universitas Diponegoro.

D. Jurnal

Darin, Moonti, U., & Indriyani, S. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis*.

Rentika, I. (2017). Pengaruh Penerapan Good Governance, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Organisasi Pemerintah (Studi empiris pada SKPD di Kota Padang). *e-Journal UNP*, 1.

Rompas, W., Jericho, P., & Legi, R. (2015). Implementasi Pendekatan Bottom Up Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*.

Ulfa. (2019). *Implementasi Kebijakan E-Musrenbang Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif Di Kota Palopo*. Palopo: Jurnal Administrasi Publik Volume 2.

E. Website

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2023). *Aspirasi Masyarakat Usulan Musrenbang*. Retrieved from Musrenbang Provinsi DKI Jakarta: <https://musrenbang.jakarta.go.id/>

Doni. (2022). Literasi Digital Masyarakat Membaik. Retrieved from Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia: <https://www.kominfo.go.id/content/detail/39858/literasi-digital-masyarakat-indonesia-membaik/0/artikel>

Data Books. (2015). *Grafik PeGI Tingkat Provinsi Tahun 2015*. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/>

Public administration. (2015). *e-Government Development Index (EDGI)*. Retrieved from <https://publicadministration.un.org/>